BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mengimplementasikan kedaulatan rakyat secara efektif, pemilu, termasuk pemilu kepala daerah. Pemilu menghasilkan tingkat partisipasi yang signifikan dan kualitas keterlibatan yang tinggi. Pemilu yang berkualitas dan partisipasi membutuhkan prasyarat khusus, termasuk kinerja pemilih yang memiliki literasi politik, kecerdasan, dan pemikiran kritis, memastikan bahwa preferensi politik mereka didasarkan pada pilihan rasional. Untuk mengimplementasikan kedaulatan rakyat secara efektif, pemilu, termasuk pemilu di tingkat daerah. Pemilu menghasilkan tingkat partisipasi yang signifikan dan kualitas keterlibatan yang tinggi. Pemilu yang berkualitas dan partisipasi membutuhkan prasyarat khusus, termasuk adanya pemilih yang melek politik, cerdas, dan kritis, yang memastikan bahwa preferensi politik mereka didasarkan pada pilihan yang rasional (Al Hamid & Hamim, 2023).

Landasan negara demokratis terletak pada ketaatan pada konstitusi dan ideologi yang berlaku. Kebebasan politik sangat penting untuk membangun negara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, yang memungkinkan penyaluran aspirasi warga negara secara efektif (Nuna & Moonti, 2019). Partisipasi politik berfungsi sebagai sarana yang signifikan untuk berkontribusi dalam mewujudkan negara yang demokratis.

Partisipasi politik dapat diwujudkan lewat berbagai cara, seperti mengambil bagian pada pelaksanaan pemilihan umum. Keikutsertaan masyarakat pada kegiatan pemilihan umum ialah sebuah bentuk partisipasi dengan tujuan untuk memberikan pengaruh terhadap proses penentuan kebijakan politik (Asrizal Saiin, 2020). Partisipasi pemilu adalah jenis keterlibatan politik yang paling mudah untuk diukur, khususnya dengan menilai rasio jumlah pemilih terhadap total populasi yang memenuhi syarat untuk memilih (Antono et al., 2021). Keterlibatan dalam dunia politik tidak terbatas hanya melalui partisipasi dalam pemilihan umum

Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Indonesia akan menjadi momentum penting bagi demokrasi, terutama dengan partisipasi signifikan dari pemilih pemula. Data yang dihimpun oleh Komisi Pemilihan Umum menunjukkan bahwa pada Pemilu 2024 diperhitungkan terdapat kurang lebih 23,3 juta pemilih pemula yang setara dengan kurang lebih 8,3% dari keseluruhan jumlah pemilih. (KPU RI, 2023). Partisipasi aktif kelompok demografis ini tidak hanya penting untuk menjaga vitalitas demokrasi, tetapi juga berperan krusial dalam proses regenerasi kepemimpinan politik nasional.

Menurut Litbang Kompas, dengan merujuk pada data KPU dan Bappenas, Titi, mantan Direktur Eksekutif Perludem, menyatakan bahwa proyeksi jumlah pemilih pemula pada Pemilu 2024 dari Generasi Z, yang berusia 17-23 tahun, adalah 30,1 juta jiwa atau 15,82 persen dari total pemilih. Angka 15,82% ini, meskipun terlihat kecil, namun sangat penting karena memungkinkan partai politik untuk melampaui ambang batas parlemen sebesar 4% jika dikelola secara efektif. Persentase ini memiliki arti penting dalam konteks persaingan elektoral di antara kandidat partai politik. Oleh karena itu, pada setiap pemilu, partai politik dan kandidatnya memprioritaskan pemilih pemula sebagai target penting dalam upaya sosialisasi dan kampanye mereka. Pemilih pemula perlu mendapatkan perhatian khusus guna mengasah kecerdasan serta kemampuan berpikir kritis mereka. memastikan bahwa pilihan politik mereka selaras dengan perilaku memilih yang rasional. Hal ini, pada gilirannya, akan berkontribusi positif terhadap kualitas hasil pemilu dan kinerja partisipasi.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya tantangan dalam partisipasi politik pemilih pemula. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik pemuda, termasuk pemilih pemula, masih relatif rendah (Kho & Yoedtadi, 2024). Hal ini dapat dikaitkan dengan rendahnya tingkat literasi politik dan kurangnya efektivitas sosialisasi politik di kalangan pemilih pemula.

Pada masa perkembangan teknologi digital, proses sosialisasi politik mengalami perubahan besar, ditandai dengan dominasi media sosial sebagai

sumber utama penyebaran informasi. Meski hal ini membuka akses informasi yang lebih luas, Cahyono(2021) menjelaskan tentang meningkatnya risiko penyebaran informasi yang tidak akurat atau bahkan manipulatif. Fenomena ini menciptakan masalah baru yaitu tingginya akses terhadap informasi politik tidak selalu berbanding lurus dengan kemampuan untuk menganalisis informasi tersebut secara kritis (Faturahmi, 2020).

Sosialisasi politik di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, terutama di wilayah-wilayah tertentu dengan tingkat partisipasi politik yang rendah. Misalnya, penelitian di Desa Mendik, Kabupaten Paser, menandakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mengoptimalkan keragaman strategi dalam melakukan sosialisasi politik. Inilah yang menjadi salah satu sebab rendahnya kesadaran politik masyarakat. Sosialisasi politik di sana terbatas pada aktivitas seperti kampanye dan diskusi politik oleh kelompok tertentu, tanpa pendekatan yang lebih inovatif atau menyeluruh. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dimana mayoritas hanya lulusan pendidikan dasar atau menengah juga memengaruhi pola pikir mereka terhadap pentingnya partisipasi politik.

Selain itu, di kalangan pemilih pemula, kurangnya sosialisasi tentang pemilu dan partai politik sering kali membuat mereka merasa bingung atau tidak tertarik untuk berpartisipasi. Sebuah laporan menyebutkan bahwa banyak pemilih muda tidak mengetahui visi dan misi calon legislatif karena minimnya upaya sosialisasi yang terarah dan relevan dengan kebutuhan mereka. Kondisi ini menunjukkan perlunya inovasi dalam metode sosialisasi politik agar dapat menjangkau semua lapisan masyarakat secara efektif.

Tingkat sosialisasi politik di Indonesia menunjukkan angka yang mengkhawatirkan, dengan banyak masyarakat yang berperan sebagai penonton pasif dalam proses politik. Menurut survei yang dilakukan oleh Kawula17, meskipun 90 persen masyarakat mengetahui tentang Pilpres 2024 dan berencana untuk berpartisipasi, sekitar 62 persen dari mereka berada pada tingkat aktivisme politik yang rendah. Kelompok terbesar adalah "spectator" atau penonton, yang mencapai 40 persen, menunjukkan bahwa mereka hanya

mengikuti perkembangan politik secara pasif tanpa terlibat langsung dalam kegiatan politik.

Merespon tantangan ini, berbagai inisiatif telah dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula. Berdasarkan hasil penelitian dari Proborini & Nurhidayati (2022) menjelaskan bahwa program pendidikan pemilih yang inovatif dan berbasis teknologi berpotensi meningkatkan partisipasi pemilih pemula hingga 25%. Namun, efektivitas program semacam ini bergantung pada kolaborasi sinergis antara lembaga pendidikan, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan organisasi masyarakat sipil.

Pendidikan politik melibatkan implementasi nilai yang telah ada dan proses penciptaan nilai-nilai baru (Hermawan, 2020). Nilai-nilai politik dapat ditanamkan melalui proses sosialisasi. Proses sosialisasi politik terjadi saat individu maupun kelompok mengadopsi nilai-nilai politik yang memengaruhi terbentuknya budaya politik masyarakat. Proses ini memainkan peran penting dalam meningkatkan partisipasi politik generasi muda. Hal ini memfasilitasi keterlibatan pemilih pemula dalam proses politik, terutama menjelang pemilihan umum

Berbagai pihak, terutama KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu, bersama dengan pemerintah dan partai politik, telah melakukan berbagai inisiatif untuk meningkatkan kecerdasan dan daya kritis pemilih pemula, terutama melalui kegiatan sosialisasi yang bersifat edukatif. Namun demikian, keterbatasan waktu, media, dan metode menyebabkan kegiatan sosialisasi tersebut belum mampu meningkatkan kecerdasan dan daya kritis (melek politik) pemilih pemula secara signifikan.

Sosialisasi pemilu terutama meningkatkan pengetahuan dan kesadaran teknis mengenai cara pemungutan suara, termasuk waktu, lokasi, dan prosedur pada hari pemilihan. Aspek-aspek substantif pemilu, termasuk pentingnya setiap suara, perlunya menumbuhkan otonomi dan kemandirian politik, dampak merugikan dari praktik politik yang korup seperti politik uang, serta implikasi masa depan dari keputusan politik, sering kali diabaikan dan tidak ditangani secara memadai dalam menumbuhkan kesadaran di kalangan pemilih pemula.

Pemilihan saluran pesan politik sangat berpengaruh terhadap literasi politik masyarakat yang difasilitasi oleh proses sosialisasi politik (Heryanto, 2020). Selain kegiatan sosialisasi politik, pendidikan politik masyarakat menjadi kebutuhan mendesak yang perlu mendapat perhatian. Pendidikan politik harus berfokus pada pengembangan kemandirian dan integritas, menghindari metode indoktrinasi yang dapat menekan pemikiran kritis dan kreativitas pemilih. (Ridha & Riwanda, 2020).

Partisipasi pemilih pemula menjadi tolok ukur penting dalam mengukur kualitas demokrasi suatu negara. Namun demikian, rendahnya tingkat literasi politik yang dimiliki sering menjadi kendala dalam mendorong partisipasi yang aktif dan kritis. Literasi politik mencerminkan kemampuan seseorang dalam memahami, menelaah, serta mengevaluasi informasi politik dan ikut serta dalam aktivitas politik.

Berdasarkan pendapat Denver dan Hands (1990) literasi politik adalah kesadaran dan pengetahuan individu terkait tata cara serta permasalahan politik yang menstimulasi peran aktifnya sebagai warga negara. Pernyataan tersebut selaras dengan pandangan Bernard Crick (2004) yang menekankan bahwa literasi politik tidak hanya mencakup pengetahuan politik, melainkan keterampilan dan sikap guna berkontribusi secara aktif dan bermakna dalam dunia politik. Miriam Budiardjo (1994) juga menegaskan bahwa Partisipasi politik menjadi bentuk nyata dari keberdaulatan rakyat dalam sistem demokrasi, di mana individu berperan langsung dalam mengarahkan masa depan bangsa melalui partisipasi di pemilu maupun kegiatan politik lainnya.. Huntington dan Nelson (1994) menambahkan, partisipasi politik mencakup segala bentuk kegiatan masyarakat yang bertujuan untuk memengaruhi arah kebijakan pemerintah, baik lewat keterlibatan langsung atau lewat perantara politik lainnya.

Disamping itu , proses sosialisasi politik memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran masyarakat dan orientasi politik individu. Almond dan Powell (1966) mendefinisikan sosialisasi politik sebagai proses pembelajaran politik yang memungkinkan individu memahami nilai, norma, serta perilaku politik yang berlaku di masyarakat. Sapiro (2004) juga menyebutkan bahwa

sosialisasi politik terjadi melalui interaksi dengan lingkungan sosial, baik melalui lingkungan keluarga, institusi pendidikan, pergaulan dengan teman sebaya, serta paparan media massa, sehingga membentuk sikap dan partisipasi politik generasi muda.

Rata-rata, pemilih pemula sebagian besar terdiri dari siswa, terutama siswa SMA. Partisipasi pemilih pemula, terutama pelajar SMA, dalam pemilihan umum merupakan pengalaman baru. Antusiasme mereka cenderung tinggi namun tidak konsisten, sering terpengaruh oleh faktor eksternal, dan mereka biasanya tidak memiliki kerangka ideologi atau motivasi yang kuat dalam mengambil keputusan politik. Fenomena ini dapat dikaitkan dengan kurangnya pendidikan dan pemahaman politik di kalangan pemilih pemula, terutama di kalangan pelajar (Bouk, 2021).

Pemilih pemula dalam Pilkada Jakarta 2024 memiliki karakteristik khusus yang mencerminkan perilaku khas generasi muda berusia antara 17 hingga 21 tahun. Mereka umumnya baru menyelesaikan pendidikan SMA atau sedang menempuh pendidikan tinggi, sehingga pemahaman politiknya masih dalam tahap perkembangan dan relatif belum matang. Kelompok ini cenderung mengikuti tren, memiliki budaya yang santai, informal, serta lebih mengutamakan kesenangan dibandingkan dengan keterlibatan serius dalam isu politik. Selain itu, mereka juga dikenal sebagai kelompok yang Berpikir analitis, memiliki otonomi dalam bertindak, bebas dari pengaruh dominasi, menolak kondisi stagnan, serta mendukung inovasi dan transformasi sosial.

Dalam hal partisipasi politik, pemilih pemula cenderung menunjukkan sikap yang dinamis dan mudah berubah-ubah karena minimnya pengalaman politik serta masih mencari identitas politik mereka. Mereka sering kali bersikap pragmatis dan oportunistis dalam menentukan pilihan politiknya, bahkan terkadang hanya mengikuti pilihan keluarga atau kelompok sosial terdekatnya tanpa pertimbangan mendalam. Namun demikian, kelompok ini juga memiliki potensi besar karena semangat tinggi, relatif rasional, dan haus akan perubahan serta kemajuan bagi lingkungannya di masa depan. Oleh karena itu, sosialisasi politik yang tepat sasaran sangat diperlukan agar pemilih

pemula dapat lebih percaya diri dan rasional dalam menentukan pilihan politiknya pada Pilkada Jakarta 2024.

Pemilih pemula yang merupakan generasi Z memiliki karakteristik perilaku politik yang khas, terutama dalam hal penggunaan teknologi digital sebagai sarana utama dalam mengakses informasi politik dan menyampaikan aspirasi. Mereka cenderung aktif berpartisipasi melalui platform digital populer seperti TikTok, Twitter, dan Instagram untuk berdiskusi, berbagi pandangan politik, serta menggalang dukungan terhadap isu-isu tertentu yang dianggap penting. Selain itu, generasi ini dikenal kritis terhadap institusi politik konvensional dan lebih tertarik pada aktivisme berbasis isu dibandingkan keterlibatan politik formal seperti bergabung dengan partai politik. Mereka lebih menghargai kampanye yang bersifat visual, interaktif, dan naratif pendek yang mudah dipahami serta relevan dengan nilai-nilai pribadi mereka.

Tipikal perilaku generasi Z dalam konteks politik juga ditandai oleh kecenderungan mereka untuk mengekspresikan identitas politik secara terbuka di ruang digital, serta partisipasi aktif dalam aksi demonstrasi maupun kampanye daring. Mereka memiliki tingkat kesadaran sosial yang tinggi terhadap isu-isu seperti keadilan sosial, kesetaraan gender, lingkungan hidup, serta hak asasi manusia. Namun demikian, generasi ini juga menunjukkan sikap skeptis terhadap struktur politik tradisional dan sering kali lebih memilih kandidat atau gerakan politik yang dapat mewakili aspirasi mereka secara autentik dan transparan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan sosialisasi politik bagi pemilih pemula dari generasi Z perlu mempertimbangkan karakteristik tersebut agar mampu meningkatkan partisipasi mereka secara efektif dalam Pilkada Jakarta 2024.

Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya literasi politik adalah Tingginya arus hoaks yang bersirkulasi di media sosial. Penelitian menunjukkan bahwa pemilih pemula sangat rentan terhadap pengaruh informasi yang tidak akurat, yang dapat mengarah pada sikap apatis atau keputusan yang tidak rasional dalam memilih. Ketidapahaman ini sering kali diperparah oleh kurangnya sosialisasi politik yang efektif dari berbagai pihak, termasuk partai politik dan pemerintah. Banyak dari mereka hanya melakukan

sosialisasi menjelang pemilu, tanpa adanya upaya berkelanjutan untuk membangun kesadaran politik di kalangan masyarakat.

Rendahnya literasi politik membuka celah bagi pihak yang tidak bertanggung jawab dalam menyalurkan informasi palsu kepada masyarakat. Oleh karena itu, di samping mengimplementasikan inisiatif literasi politik untuk masyarakat, baik pemerintah maupun partai politik harus secara aktif terlibat dalam meningkatkan kesadaran publik mengenai literasi media. Pemahaman masyarakat terhadap informasi media secara signifikan berdampak pada keterlibatan masyarakat, terutama dalam konteks politik (Fitriani et al., 2023). Literasi politik bertujuan untuk mencegah praktik korupsi dan secara aktif meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam pembangunan bangsa dan negara.

Tingkat literasi politik di Indonesia menunjukkan perkembangan yang beragam, terutama di kalangan generasi muda. Kajian yang dilakukan Japelidi atau Jaringan Pegiat Literasi Digital pada 2023 mengungkapkan tentang indeks literasi digital dalam konteks politik di kalangan generasi muda mencapai rata-rata di atas 3.5, dengan Jawa Timur mencatat indeks tertinggi (3.9) dan Yogyakarta terendah (3.5)¹. Meskipun kemampuan akses informasi melalui internet cukup baik, keterlibatan aktif dalam membahas isu politik di media sosial tergolong minim, dengan banyak responden tidak terlibat dalam akun resmi seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan partai politik.

Selain itu, literasi politik di kalangan pemilih pemula juga menjadi perhatian. Penelitian menunjukkan bahwa pemilih pemula sering kali terpapar informasi hoax yang dapat memengaruhi sikap politik mereka. Hal ini menekankan perlunya pendidikan literasi politik yang berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi mereka. Laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat bahwa penetrasi internet di Indonesia mencapai 78,19% pada tahun 2023, dengan mayoritas pengguna aktif media sosial, yang menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan literasi politik melalui platform digital.

Namun, tantangan tetap ada, seperti kurangnya sosialisasi politik yang efektif dan rendahnya kepercayaan terhadap partai politik. Generasi muda

cenderung apatis terhadap partisipasi politik dan lebih memilih untuk mengonsumsi informasi secara pasif daripada terlibat aktif dalam proses politik. Dengan demikian, literasi politik harus ditingkatkan lewat cara yang lebih melibatkan partisipasi aktif dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan generasi muda.

Di Indonesia, fenomena ini terlihat jelas menjelang Pilkada 2024. Dengan populasi pemilih muda yang semakin besar, penting bagi generasi ini untuk memiliki pemahaman yang cukup terkait proses politik dan hak-haknya sebagai warga negara. Literasi politik bukan hanya sekadar pengetahuan tentang sistem pemerintahan, tokoh politik, atau proses pemilu, tetapi juga mencakup kemampuan setiap individu dalam memahami, menganalisis, serta mengevaluasi dinamika politik secara kritis. Literasi ini mencerminkan sejauh mana seseorang dapat menggunakan pengetahuannya untuk berpartisipasi secara aktif, mengambil keputusan yang rasional, serta menanggapi isu-isu politik dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai bagian dari warga negara dalam sistem demokrasi. Dengan demikian, peningkatan literasi politik memerlukan dukungan pendidikan dan sosialisasi yang tepat agar dapat terlaksana secara efektif.

Data menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan pemilih pemula pada Pemilu 2024 di Indonesia masih tergolong rendah, dengan perkiraan hanya sekitar 52% dari kalangan muda yang diprediksi akan ikut memberikan suara. Di beberapa daerah, angka partisipasi pemilih pemula bahkan lebih rendah; misalnya, di Desa Sekaran, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, tingkat keikutsertaan pemilih pemula hanya mencapai 68,45% (Astoko et al., 2024).

Rendahnya angka partisipasi ini pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Indonesia menunjukkan adanya fenomena yang perlu mendapatkan perhatian serius. Berdasarkan temuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), angka partisipasi pemilih pemula pada pemilu sebelumnya berada di bawah rata-rata nasional, yang disebabkan oleh minimnya pemahaman politik di kalangan remaja, kurangnya informasi, serta maraknya disinformasi dan hoaks yang beredar di kalangan generasi muda. Di Jakarta, Komisi A DPRD juga mencatat

rendahnya partisipasi pemilih muda dalam Pilkada 2024, dengan banyak anak muda yang tidak menggunakan hak pilihnya saat pemungutan suara.

Rendahnya persentase keikutsertaan pemilih muda dalam ajang pemilihan umum di Indonesia merupakan fenomena yang menarik perhatian. Berdasarkan data terbaru, tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024 secara nasional berada di bawah 70%, dengan beberapa daerah mencapai angka partisipasi sekitar 54% (Goodstast, 2024). Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi ini antara lain ketidakpuasan terhadap kandidat, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses politik, serta biaya pilkada yang tinggi yang membuat calon yang diharapkan oleh masyarakat tidak dapat berpartisipasi. (Tempo, 2024).

Penting untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap informasi yang berkaitan dengan proses pemilihan umum guna mengatasi penyebaran informasi yang menyesatkan terkait hal tersebut. Informasi yang tidak akurat atau tipuan pasti akan menyebabkan lingkungan yang kurang kondusif di masyarakat. Maraknya informasi hoaks di Indonesia telah menimbulkan skeptisisme yang signifikan terhadap informasi yang disebar, yang sering kali menimbulkan kebingungan masyarakat (Triyono, 2021). Penelitian ini berusaha untuk mengevaluasi dampak literasi politik dan pemahaman pemilih pemula yang didapat terhadap pemilihan umum 2024 terhadap pengelolaan informasi yang menyesatkan.

Miriam Budiardjo (1994) mengartikan partisipasi politik sebagai keterlibatan langsung individu dan kelompok dalam proses politik, baik melalui pemberian suara dalam pemilihan umum, mempengaruhi jalannya kebijakan publik, bergabung dengan partai politik, maupun berpartisipasi dalam gerakan sosial. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi, dimana masyarakat memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan dan masa depan bangsa melalui mekanisme politik yang tersedia.

Lebih lanjut, Miriam Budiardjo menjelaskan bahwa partisipasi politik didorong oleh keyakinan seseorang melalui keterlibatan tersebut bahwa kepentingan individu atau kelompok dapat tersalurkan dan diperhatikan oleh

pihak yang berwenang (Budiardjo, 1994). Hal ini relevan dengan pemilih pemula yang cenderung baru mengenal dunia politik dan membutuhkan dorongan serta literasi politik untuk memahami pentingnya keterlibatan mereka dalam proses demokrasi. Literasi politik yang efektif dapat membantu pemilih pemula merasa lebih percaya diri dalam membuat keputusan yang rasional dan mendukung kandidat yang sejalan dengan prinsip dan nilai-nilai pribadi mereka.

Literasi politik dan sosialisasi politik berperan penting dalam meningkatkan keterlibatan pemilih pemula, khususnya dalam Pilkada Jakarta 2024. Menurut Huntington dan Nelson (1994 : 22), partisipasi politik merupakan segala bentuk aktivitas warga negara yang bertujuan mempengaruhi proses pengambilan keputusan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks pemilihan umum, literasi politik menjadi prasyarat yang esensial guna menjamin terlaksananya demokrasi yang berkualitas dan partisipatif. Warga yang memiliki pengetahuan politik memadai cenderung bersikap kritis dan berdaya dalam menentukan pilihan mereka, sehingga menghasilkan pemilu yang berkualitas. Literasi politik mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap terhadap isu-isu politik serta proses pengambilan keputusan, yang memungkinkan pemilih pemula untuk merasa bahwa mereka dapat berperan dalam sistem demokrasi secara efektif dan bermakna.

Pilkada DKI Jakarta 2024 dihadapkan pada dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang sangat kompleks dan strategis. Jakarta adalah ibu kota negara dengan karakteristik unik di Indonesia, sehingga memerlukan perhatian yang lebih mendalam dalam proses politiknya, dengan jumlah penduduk lebih dari 11 juta jiwa (BPS DKI Jakarta, 2023) dan tingkat kepadatan sekitar 16.000 jiwa/km², menjadikannya salah satu kota terpadat di dunia. Dalam Pilkada kali ini, diperkirakan terdapat lebih dari 600.000 pemilih pemula (berdasarkan proyeksi KPU DKI Jakarta), atau sekitar 8–10% dari total daftar pemilih tetap. Kelompok pemilih pemula, terutama dari Generasi Z (usia 17–23 tahun), menjadi segmen strategis yang sangat menentukan dalam hasil kontestasi,

sekaligus cerminan dinamika partisipasi politik generasi muda di wilayah urban.

Sejumlah isu perkotaan menjadi pusat perhatian dan akan menjadi materi utama dalam kampanye Pilkada. Masalah kemacetan lalu lintas menimbulkan kerugian ekonomi lebih dari Rp 65 triliun per tahun, dengan rata-rata waktu tempuh perjalanan warga mencapai 1,5 jam/hari (Jakarta Transportation Report, 2023). Polusi udara Jakarta yang kerap melebihi ambang batas WHO telah memicu peningkatan kasus penyakit ISPA; indeks kualitas udara (AQI) Jakarta sering masuk 10 besar terburuk dunia. Banjir masih terjadi di lebih dari 200 titik rawan setiap musim hujan, mengganggu aktivitas ribuan rumah tangga dan pusat ekonomi. Akses air bersih juga menjadi perhatian, dengan sekitar 30% penduduk masih mengandalkan air tanah yang kualitasnya menurun akibat pencemaran.

Dengan seluruh kompleksitas isu, data, dan dinamika yang ada, Pilkada DKI Jakarta 2024 tidak hanya menjadi ajang pertarungan para calon kepala daerah, tetapi juga barometer kematangan demokrasi perkotaan dan partisipasi generasi muda Indonesia, khususnya pemilih pemula yang potensial menjadi agen perubahan dalam proses demokrasi di masa mendatang.

Sebagai fokus penelitian, dipilih Kelurahan Cipayung, yang secara administratif berada di Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Data demografi menunjukkan bahwa Kecamatan Cipayung memiliki struktur penduduk yang relatif muda, dengan persentase penduduk usia produktif cukup tinggi, yaitu sekitar 69,87% pada tahun 2014. Publikasi "Kecamatan Cipayung dalam Angka 2023" dan "Kecamatan Cipayung dalam Angka 2019" mencatat jumlah penduduk total di Kecamatan Cipayung sekitar 274.149 jiwa pada tahun 2018 dan meningkat menjadi 308.528 jiwa pada tahun 2023. Meskipun data spesifik mengenai jumlah pemilih pemula (usia 17-21 tahun) dan profil tingkat pendidikan serta pekerjaan terbaru untuk Kelurahan Cipayung secara eksplisit tidak selalu tersedia secara terperinci dalam semua cuplikan yang diakses, data umum dari Kecamatan Cipayung serta data terkait fasilitas pendidikan di

wilayah tersebut mengindikasikan adanya populasi pemilih pemula yang cukup besar dan relevan untuk dijadikan subjek penelitian.

Selain itu, Kecamatan Cipayung memiliki karakteristik kepadatan penduduk yang termasuk paling rendah di Jakarta Timur, yang berpotensi menawarkan dinamika sosial-ekonomi dan akses informasi yang mungkin berbeda dibandingkan dengan area perkotaan yang lebih padat di Jakarta. Pemilihan Kelurahan Cipayung sebagai unit analisis yang lebih spesifik memungkinkan dilakukannya penelitian yang lebih mendalam dan terfokus. Karakteristik demografinya, terutama dengan adanya proporsi penduduk usia muda yang signifikan, sangat relevan dengan fokus penelitian ini. Namun, penting untuk digarisbawahi bahwa pemilihan lokasi ini juga memerlukan justifikasi lebih lanjut dalam bab metodologi mengenai apakah Kelurahan Cipayung memiliki karakteristik unik tertentu atau justru dapat dianggap representatif dalam beberapa aspek (misalnya, tingkat pendidikan rata-rata warganya, tingkat akses terhadap internet dan media informasi, jenis pekerjaan dominan, atau tingkat partisipasi historis dalam pemilu sebelumnya) yang membuatnya menjadi kasus yang ideal atau menarik untuk menguji hipotesis penelitian. Tanpa justifikasi yang kuat, kemampuan untuk melakukan generalisasi temuan penelitian ini mungkin akan terbatas.

Berdasarkan penjelasan di atas, penting untuk mengidentifikasi dan mengupayakan secara konsisten sebuah model kegiatan sosialisasi dalam pendidikan politik yang secara efektif dapat menumbuhkan dan meningkatkan kecerdasan dan daya kritis para pemilih pemula secara komprehensif dan bermakna. Sosialisasi literasi politik bagi pemilih pemula memegang peranan penting dalam meningkatkan kesadaran politik mereka, terutama dalam memahami hak, kewajiban, serta peran aktif sebagai warga negara dalam sistem demokrasi. Pendekatan pendidikan ini dilakukan untuk memberikan dampak positif terhadap pengetahuan kepemiluan dan menumbuhkan kesadaran politik yang substantif, khususnya di kalangan pemilih pemula.

Partisipasi politik pemilih pemula dalam Pilkada Jakarta 2024 menjadi isu strategis yang sangat relevan untuk diteliti mengingat peran generasi muda sebagai agen perubahan dan penentu arah masa depan demokrasi Indonesia.

Pemilih pemula, Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pemuda, kelompok ini memasuki tahap kritis dalam pembentukan identitas politik, nilai-nilai, dan orientasi mereka. Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa tingkat kesadaran politik dan efektivitas pembinaan politik di kalangan pemilih baru masih bervariasi, dengan sebagian besar di antaranya menunjukkan pemahaman yang terbatas serta keterlibatan yang rendah dalam proses politik. Banyak dari mereka tidak sepenuhnya memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, dan belum memiliki kesadaran politik yang cukup untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses pemilihan umum. Hal ini menyebabkan rendahnya keterlibatan pemilih pemula dalam menentukan arah kebijakan publik melalui pemilu, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas demokrasi secara keseluruhan.

Berdasarkan observasi langsung yang peneliti lakukan di lingkungan rumah dan bersama teman-teman sebaya di Kelurahan Cipayung, Jakarta Timur, peneliti menemukan adanya perbedaan yang cukup jelas dalam hal pengetahuan dan sikap politik di kalangan pemilih pemula menjelang Pilkada Jakarta 2024. Dari sekitar 20 orang pemilih pemula yang peneliti ajak berdiskusi secara informal, hanya sebagian kecil yang mengetahui secara pasti nama-nama calon kepala daerah beserta visi dan program kerja mereka. Sebagian besar mengaku belum pernah mengikuti kegiatan sosialisasi pemilu, baik yang diadakan di sekolah, lingkungan RT/RW, maupun melalui media daring. Tidak sedikit pula yang mengaku hanya mendapatkan informasi politik secara sepintas dari media sosial, tanpa mengecek kebenarannya. Bahkan, ada beberapa di antara mereka yang merasa tidak terlalu penting untuk mengikuti perkembangan Pilkada karena merasa suara mereka tidak akan berdampak besar. Hanya beberapa teman yang aktif mengikuti diskusi politik atau menghadiri sosialisasi yang diadakan oleh perangkat kelurahan. Temuan sederhana dari observasi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan literasi politik dan kurangnya sosialisasi politik di kalangan pemilih pemula di lingkungan saya. Jika kondisi ini dibiarkan, dikhawatirkan partisipasi mereka dalam Pilkada Jakarta 2024 akan rendah, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Berdasarkan kenyataan tersebut, saya merasa penting untuk meneliti

lebih jauh bagaimana pengaruh literasi politik dan sosialisasi politik terhadap partisipasi pemilih pemula di Kelurahan Cipayung secara kuantitatif, agar dapat memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai tantangan yang dihadapi pemilih muda dalam Pilkada mendatang.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memastikan bahwa pemilih pemula tidak hanya berpartisipasi secara kuantitas, tetapi juga secara kualitas, yaitu mampu mengambil keputusan politik secara rasional dan bertanggung jawab. Rendahnya literasi politik dan lemahnya sosialisasi politik berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan seperti apatisisme politik, rendahnya partisipasi dalam pemilu, serta tumbuhnya budaya politik yang pragmatis. Apabila permasalahan ini dibiarkan, bukan tidak mungkin akan berimplikasi pada menurunnya kualitas demokrasi lokal dan berkurangnya kepercayaan publik terhadap hasil Pilkada., serta menghambat upaya regenerasi kepemimpinan yang sehat dan demokratis di masa depan.

Menurut pandangan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), keterlibatan politik pemilih pemula berkaitan erat dengan usaha membentuk komunitas warga negara yang aktif (civic community) yakni masyarakat warga yang memiliki orientasi kebangsaan, kesadaran akan hak serta tanggung jawab sipil, dan kemampuan berpikir kritis dalam mengambil keputusan politik. Konsep civic community menekankan pentingnya komunitas yang inklusif, partisipatif, dan berbasis nilai demokrasi Pancasila. Dengan demikian, penguatan literasi politik dan sosialisasi politik pemilih pemula adalah bagian integral dari pendidikan kewarganegaraan yang bertujuan menumbuhkan warga negara yang aktif, sadar hukum, dan berintegritas.

Mengingat kompleksitas persoalan terkait rendahnya partisipasi politik di kalangan pemilih pemula, diperlukan penelitian mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi perilaku memilih mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis dampak budaya politik dan pendidikan politik terhadap partisipasi pemilih pemula, khususnya dalam konteks Pilkada 2024 sebagai pemilu pertama pasca pandemi COVID-19. Fokus penelitian diarahkan pada integrasi analisis literasi politik dan sosialisasi politik yang belum banyak

diteliti secara simultan dalam studi-studi sebelumnya, serta mengembangkan model prediktif partisipasi politik pemilih pemula. Melalui pendekatan komprehensif berbasis kajian PPKn dan civic community ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis yang signifikan bagi pengembangan strategi peningkatan partisipasi politik pemilih pemula yang lebih efektif, berkelanjutan, serta memperkaya literatur perilaku pemilih dan penguatan demokrasi di Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tingkat literasi politik pemilih pemula menjelang Pilkada 2024 masih bervariasi; banyak pemilih pemula belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, sehingga kapasitas mereka untuk berpartisipasi secara cerdas dalam pemilu dipertanyakan.
2. Efektivitas sosialisasi politik bagi pemilih pemula dalam konteks Pilkada 2024 belum optimal; banyak pemilih pemula kurang terpapar informasi politik yang memadai, yang berdampak pada rendahnya kesadaran dan antusiasme mereka untuk terlibat dalam proses politik.
3. Pengaruh literasi politik dan sosialisasi politik terhadap partisipasi pemilih pemula diduga signifikan, namun belum diteliti secara mendalam; terdapat indikasi bahwa kedua faktor tersebut memengaruhi tingkat partisipasi politik pemilih pemula, di samping faktor-faktor lain yang juga berperan dalam menentukan keterlibatan politik generasi muda ini.

Masalah-masalah di atas penting untuk diteliti karena mencerminkan kesenjangan antara harapan dan realitas partisipasi politik pemilih pemula. Secara konseptual, literasi politik yang rendah dan sosialisasi politik yang kurang efektif dapat mengakibatkan pemilih pemula tidak mampu membuat keputusan politik yang rasional, sehingga kualitas partisipasi dan outcome demokrasi menjadi suboptimal. Secara kontekstual, Pilkada Jakarta 2024 merupakan ajang krusial di mana pemilih pemula berperan sebagai

stakeholders baru dalam demokrasi lokal. Jumlah mereka yang signifikan dan karakteristik generasi muda yang melek digital tetapi rentan misinformasi membuat studi ini urgen untuk dilakukan. Dengan mengetahui dan memahami kepengaruhannya antara literasi dan sosialisasi politik terhadap partisipasi pemilih pemula, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk memberdayakan pemilih muda dan meningkatkan kualitas demokrasi lokal di Jakarta.

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada pengaruh budaya politik dan pembentukan sosial terhadap partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2024. Tingkat budaya politik pemilih pemula merupakan isu yang sangat penting, karena pemahaman mereka terhadap isu-isu politik, proses pemilihan, serta hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara akan menentukan tingkat partisipasi mereka dalam pemilihan Pilkada. Selain itu, pembentukan sosial politik juga memainkan peran sentral dalam membentuk kesadaran politik pemilih pemula. Penelitian ini akan membahas proses dan efektivitas pembentukan kesadaran politik yang dilakukan melalui media massa, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan partai politik.

Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi berbagai bentuk partisipasi politik pemilih pemula dalam Pilkada 2024, baik yang bersifat konvensional, seperti pemungutan suara, maupun non-konvensional, seperti kampanye di media sosial. Hal ini untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai partisipasi politik pemilih pemula.. Pembatasan masalah ini dilakukan untuk memfokuskan penelitian pada isu-isu kunci yang berkaitan dengan partisipasi politik pemilih pemula dalam Pilkada 2024.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang serta identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada rumusan masalah berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh signifikan literasi politik secara parsial terhadap partisipasi pemilih pemula di Kelurahan Cipayung, Jakarta Timur dalam Pilkada Jakarta 2024?
2. Apakah terdapat pengaruh signifikan sosialisasi politik secara parsial terhadap partisipasi pemilih pemula di Kelurahan Cipayung, Jakarta Timur dalam Pilkada Jakarta 2024?
3. Apakah terdapat pengaruh signifikan literasi politik dan sosialisasi politik secara simultan terhadap partisipasi pemilih pemula di Kelurahan Cipayung, Jakarta Timur dalam Pilkada Jakarta 2024?

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan studi ilmu politik, khususnya yang berkaitan dengan budaya politik, pembentukan politik, dan partisipasi politik pemilih pemula. Hasil penelitian ini akan memperkaya pemahaman teoritis tentang pengaruh budaya politik dan pembentukan politik terhadap partisipasi politik pemilih pemula dalam konteks pemilihan gubernur.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian-penelitian masa depan yang membahas topik serupa, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Hasil eksperimental yang dihasilkan dari studi ini dapat menjadi dasar untuk mengembangkan model atau kerangka konseptual baru dalam memahami dinamika partisipasi politik pemilih pemula..

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi beberapa lembaga terkait, antara lain:

a) Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Penelitian ini dapat memberikan informasi berharga bagi KPU dalam merancang dan melaksanakan program-program sosialisasi politik yang lebih efektif untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam Pemilihan Kepala daerah 2024. Temuan penelitian mengenai tingkat literasi politik dan bentuk-bentuk sosialisasi politik yang diterima oleh pemilih pemula dapat menjadi dasar bagi KPU dalam menyusun strategi edukasi politik yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pemilih pemula.

b) Partai Politik

Bagi partai politik, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dalam merancang kegiatan kampanye dan komunikasi politik yang lebih efektif untuk menjangkau dan menarik minat pemilih pemula. Pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula dapat membantu partai politik dalam menyusun program-program yang dapat meningkatkan keterlibatan pemilih pemula dalam proses politik.

c) Organisasi Masyarakat

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi masyarakat sipil lainnya yang fokus pada pendidikan politik dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk merancang program-program literasi politik yang lebih sesuai dengan kebutuhan pemilih pemula. Informasi mengenai tingkat literasi politik dan bentuk-bentuk sosialisasi politik yang efektif dapat menjadi dasar bagi organisasi masyarakat sipil dalam mengembangkan materi dan metode edukasi politik yang lebih tepat sasaran.

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi lembaga-lembaga terkait, seperti KPU, pemerintah daerah, maupun institusi pendidikan, dalam merancang strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula, khususnya menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024. Temuan mengenai

pengaruh signifikan literasi politik dan sosialisasi politik dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan yang lebih terarah dan berbasis bukti.

F. State Of Art

Dalam berbagai studi mengenai partisipasi politik pemilih, khususnya pada kelompok pemula, masih terdapat sejumlah celah kajian yang belum banyak dieksplorasi secara mendalam. Penelitian ini hadir untuk menjawab kekosongan tersebut dengan menawarkan pembaruan dari sisi teori, konteks, dan pendekatan. Adapun kebaruan atau state of the art dari penelitian ini dapat diuraikan dalam tiga poin utama sebagai berikut:

1. Minimnya kajian yang mengintegrasikan literasi politik dan sosialisasi politik secara simultan

Penelitian terdahulu umumnya masih membahas literasi politik dan sosialisasi politik sebagai variabel yang berdiri sendiri. Padahal, keduanya saling berkaitan dalam membentuk sikap dan perilaku politik individu, terutama pada kelompok pemilih pemula. Kurangnya pendekatan integratif ini menyisakan ruang analisis yang belum tergarap secara menyeluruh dalam konteks kepemiluan.

2. Fokus terhadap pemilih pemula dalam konteks Pilkada masih terbatas.

Sebagian besar studi yang mengkaji perilaku pemilih lebih berfokus pada pemilih umum dan dalam konteks pemilu nasional. Sementara itu, pemilih pemula yang merupakan aktor penting dalam regenerasi demokrasi masih belum banyak dikaji secara mendalam dalam kerangka Pilkada. Padahal, Pilkada merupakan arena politik lokal yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat sehari-hari.

3. Keterbaruan konteks waktu dan relevansi empiris dalam Pilkada 2024

Penelitian ini menawarkan kontribusi aktual dengan mengambil momentum Pilkada 2024 sebagai konteks empirik. Hal ini tidak hanya menunjukkan keterbaruan dari segi waktu, tetapi juga memberikan sumbangsih langsung terhadap upaya peningkatan partisipasi politik generasi muda dalam pesta demokrasi lokal yang akan segera berlangsung.